

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J., Mehta, S., Epelu, E., Cohen, B., 2015. Managing leftovers: Does community forestry increase secure and equitable access to valuable resources for the rural poor?. *Forest Policy and Economics*. 58 (2015), 47-55. <http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2014.12.004>
- Awang, S. 2001. Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan. Debut Press. Yogyakarta.
- Awang, S.A. 2003. *Politik Kehutanan Masyarakat*. Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Awang, S.A. 2004. *Dekonstruksi Sosial Forestri: Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan*. BIGRAF Publishing. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang. 2020. Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2020. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang. Pemalang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang. 2019. Kecamatan Randudongkal Dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang. Pemalang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2014. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Jawa Tengah Tahun 2014. *Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jawa Tengah No. 81/12/33 Th. VIII, 23 Desember 2014*.
- Bidang Statistik Sosial. 2018. *Statistik Potensi Desa Indonesia 2018*. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- Cahyat, A. 2004. Governance Brief Bagaimana Kemiskinan Diukur? Beberapa model penghitungan kemiskinan di Indonesia. CIFOR. November 2004 Number 2
- Covarrubias K, Campos OLDPA, Zezza A. 2009. Accounting for the Diversity of Rural Income Sources in Developing Countries: The Experience of the Rural Income Generating Activities Project. Food and Agricultural Organization, Rome-Italy (Technical Paper prepared for presentation at the Wye City Group Meeting on Rural Development and Agricultural Household Income, 11-12 June, 2009, Rome, Italy)
- Creswell, J.W. 2013. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, Inc. California.
- Dewi, I.N., Awang, S.A., Andayani, W., Suryanto, P. 2018. Karakteristik Petani dan Kontribusi Hutan Kemasyarakatan (HKm) terhadap Pendapatan Petani di Kulon Progo. *Jurnal Ilmu Kehutanan* 12 (2018) 86-98.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.4708/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2017 tentang Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3869/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Gunung Gajah Lestari Seluas ± 295 ha pada Kawasan Hutan Produksi di Wilayah Kerja Perum Perhutani yang Terletak di KPH Pemalang, Desa Gongseng dan Desa Banjarmulya, Kecamatan Randudongkal, dan Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.

- Kastanya, A., Tjoa, M., Mardiatmoko, G., Latumahina, F., Bone, I., Aponno, H.E.S., 2018. Kajian Dampak Perhutanan Sosial Wilayah Maluku-Papua. Program Studi Manajemen Hutan PPs UNPATTI. Ambon.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.744/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/I/2019 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi III).
- Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). 2018. Kecamatan Randudongkal Dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang. Pemalang.
- Supriyanto, B., Karyana, A., Rosdiana, E., Tjiptono, B.H., Dwiwati, N., Prasetiani, C.E., Simanjuntak, S., Nurhasnih, Rahmansyah, T.A., Sumarah, A.D., Siregar, I.P., Hidayat, H., Anggraeni, R., Haryanto, G. 2018. Dampak Perhutanan Sosial; Perspektif Ekonomi Sosial, dan Lingkungan. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Jakarta.
- Mary, R., Armanto, D., Lukito. 2007. Dominasi dan Resistensi Pengelolaan Hutan di Jawa Tengah (studi kasus di 4 Kabupaten). Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum dan Masyarakat Berbasis Ekologis (HuMa). Jakarta.
- Maryudi, A., 2011. *The Contesting Aspirations in the Forests: Actors, Interests and Power in Community Forestry in Java, Indonesia*. University Press, Goettingen.
- Maryudi, A., 2012. Restoring state control over forest resources through administrative procedures: evidence from a community forestry programme in Central Java, Indonesia. *ASEAS-Austrian Journal of South-East Asian Studies* Vol 5 (2), 229–242.
- Maryudi, A., Krott, M., 2012. Local struggle for accessing state forest property in a montane forest village in Java, Indonesia. *Journal of Sustainable Development*. 5 (7), 62–68. DOI: [10.5539/jsd.v5n7p62](https://doi.org/10.5539/jsd.v5n7p62)
- Maryudi, A., Devkota, R., Schusser, C., Yufanyi, C., Salla, M., Aurenhammer, H., Rotchanaphatharawit, R., Krott, M., 2012. Back to basics: considerations in evaluating the outcomes of community forestry. *Forest Policy and Economics*. 14 (2012), 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2011.07.017>
- Maryudi, A., Citraningtyas, E.R., Purwanto, R.H., Sadono, R., Suryanto, P., Riyanto, S., Siswoko, B.D., 2016. The emerging power of peasant farmers in the tenurial conflicts over the uses of state forestland in Central Java, Indonesia. *Forest Policy and Economics*. 67 (2016), 70-75. <http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2015.09.005>
- Peluso, N.L., 1992. *Rich Forest Poor People Resource Control and Resistance in Java*. University of California Press. The United States of America.
- Peluso, N.L., 2011. Emergent forest and private regime in Java. *The Journal of Peasant Studies*. Volume 38 (2011), 811-836. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.608285>
- Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor : P.2/PSKL/SET/KUM.1/3/2017 tentang Pedoman Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Perhutanan Sosial.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor : P.8/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

- Pemanfaatan Hutan dan Rencana Kerja Tahunan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.
- Perum Perhutani Kantor Pusat. 2019. Statistik Perum Perhutani Tahun 2014-2018. Perum Perhutani.Jakarta.
- Pokharel, R.K., Raj, P., Raj, K., Köhl, M. 2014. Assessing the Sustainability in Community Based Forestry: a Case from Nepal. *Forest Policy and Economics*. 58. pp.75–84. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2014.11.006>.
- Pratama, A.A. 2019. Lessons Learned from Social Forestry Policy in Java Forest: Shaping the Way Forward for New Forest Status in ex-Perhutani Forest Area Pembelajaran dari Kebijakan Perhutani Sosial di Hutan Jawa: Menyusun Langkah Ke-depan untuk Status Hutan Baru di Kawasan Hutan eks-Perhutani. *Jurnal Ilmu Kehutanan* Vol.13 No.2 (2019) 127-136.
- Purwanto, R.H. dan Sisfanto, N. 2014. Pengaturan Kelestarian Hasil Hutan Kayu Teori dan Aplikasinya. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Jakarta.
- Ribot, J.C., Peluso, N.L. 2003. A Theory of Access. *Rural Sociology*. 68(2).2003, pp.153-181.
- Raharjo, S.A.S., Hastanti, B.W, Haryanti, N. 2020. Dinamika Kelembagaan Perhutanan Sosial di Wilayah Perhutani: Studi Kasus di KPH Telawa, Jawa Tengah. **POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik** Vol.11, No. 2, 2020 doi: 10.14710/politika.11.2.2020.183-197
- Rusli, S. Widiono, S. Indriana, H. 2009. Tekanan Penduduk, Overshoot Ekologi Pulau Jawa, dan Masa Pemulihannya. *Sodality : Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* Vol. 3 No. 1 April 2009 : 77-112. <https://doi.org/10.22500/sodality.v3i1.5871>
- Rustiadi, E., Kartodihardjo, H., Juanda, B., Augusta, I., Rusdiana, O., Nasution, A., Mulya, S.P., Bahri, A.D., Tetiani, A., Aqmarina, A., Rusyana, N., Pravitasari, A.E., Jumiadin, U.H., Tusianti, E., Yani, A., Eva, Indrasari, N.2015. Analisis Tematik ST2013 Subsektor : Analisis Rumah Tangga Usaha Bidang Kehutanan dan Rumah Tangga Sekitar Hutan. Badan Pusat Statistik.Jakarta.

- Sahide, M.A.K, Jusuf, Y., Alam, S., Supratman, Millang, S., Mahbub, A.S., Bachtiar, B., Sabar, A., Nasri, Nursaputra, M., Ahmad, M.F., Yahya, N.H. 2018. Kajian Dampak Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Sanudin., dan Awang., San Afri. 2019. Evaluasi Kehutanan Sosial: Tantangan Generasi 3. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Jakarta.
- Schlager, E., Ostrom, E. 1992. Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis. *Land Economics*; Aug 1992; 68, 3; pg. 249.
- Simon, H. 1999. Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat : Teori dan Aplikasi di Hutan Jati Jawa. BIGRAF Publishing. Yogyakarta.
- Sugiharto, A., Widodo, A., Mustika Adi, H., Liliana DW, Afwandi. 2019. Kajian PHBM dan IPHPS di Kelas Perusahaan Jati, Studi Kasus di KPH Pemalang. *Jurnal Penelitian Hutan Lestari Produktif* Vol 22 (2019) 31-37.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Manajemen : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian *Tindakan dan Penelitian Evaluasi*. Alfabeta. Bandung.
- Sumanto, S.E., 2009. Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial dalam Perspektif Resolusi Konflik (Social Forestry Development Policy in Conflict Resolution Perspective). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 6 No. 1, April 2009 : 13 – 25. <https://doi.org/10.20886/jakk.2009.6.1.%25p>
- Sunderlin, W.D. 2006. Poverty Alleviation through Community Forestry in Cambodia, Laos, and Vietnam: An assessment of the potential. *Forest Policy and Economics*. 8:386- 396.
- Suprpto, E. dan Purwanto, A.B. 2013. Hutan Jawa : Kontestasi dan Kolaborasi. Biro Penerbitan AruPa. Yogyakarta.
- Susilowati, S.H. dan Maulana, M. 2012. LUAS LAHAN USAHATANI DAN KESEJAHTERAAN PETANI : Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria. *Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 10 No. 1, Maret 2012 : 17-30.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Winarwan, D., Awang, S.A., Keban, Y.T., Semedi, P. 2011. Kebijakan Pengelolaan Hutan, Kemiskinan Struktural dan Perlawanan Masyarakat. *Jurnal Kawistara* Volume 1 No.3 22 Desember 2011 Hal 213-224.